

BAB I

PENDAHULUAN

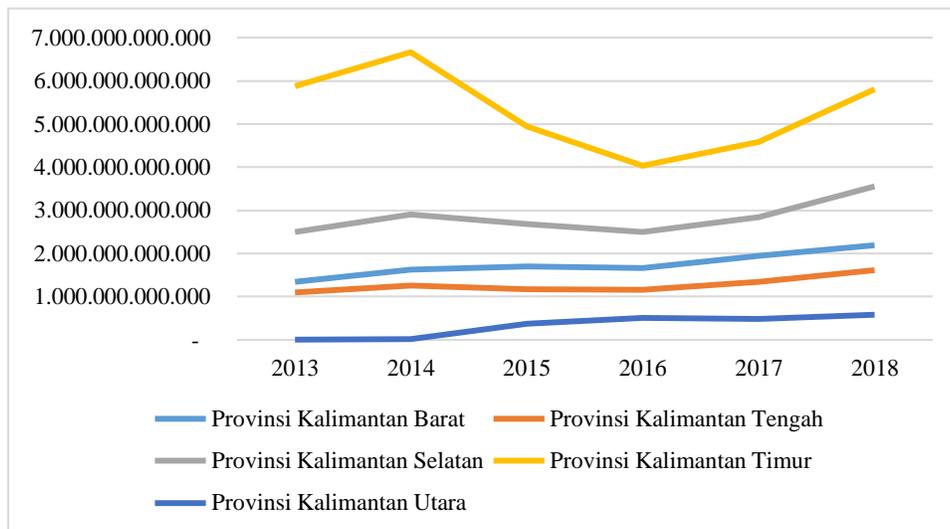
1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah pusat memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal demi keberlangsungan daerahnya. Peluang ini terwujud dalam bentuk desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk menciptakan aspek kemandirian dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik di daerahnya (Harefa *et al* 2018). Setiap pemerintah daerah berupaya keras untuk meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya. Pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ada perlu ditingkatkan dan daerah juga harus selalu kreatif dan inovatif dalam mencari serta mengembangkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lain, sehingga dengan semakin banyak sumber-sumber PAD yang dimiliki, maka daerah akan banyak memiliki sumber pendapatan yang akan dipergunakan dalam membangun daerahnya. Peranan PAD dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Harefa *et al* (2018) di dalam bukunya yang berjudul “Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah”, semakin besar suatu daerah memperoleh atau menghimpun PAD maka akan semakin besar pula dana daerah yang tersedia untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdasarkan data realisasi PAD di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2013-2018, Kalimantan Barat menerima rata-rata PAD sebesar Rp1.746.067.299.686. Nilai ini jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan merupakan nilai PAD

tertinggi ke-3 dari total 5 provinsi di Kalimantan. Nilai rata-rata PAD tertinggi di Kalimantan diperoleh oleh Kalimantan Timur dan yang terendah pada Kalimantan Utara. Perolehan PAD Kalimantan Utara sebagai yang terendah terbilang wajar karena Kalimantan Utara merupakan provinsi yang baru muncul pada tahun 2014. Untuk Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah merupakan daerah yang sudah beroperasi lebih dari 10 tahun di bawah otonomi daerah sehingga daerah-daerah tersebut sudah sepatutnya mengetahui potensi masing-masing.

Gambar 1. 1 PAD Kalimantan Tahun 2013-2018



Setiap daerah memiliki potensinya masing-masing dan caranya masing-masing untuk meningkatkan penerimaan PAD. PAD meliputi penerimaan pajak, retribusi daerah, penerimaan lembaga, BUMN dan penerimaan lainnya dan dihitung dalam ribuan rupiah per tahun. PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. PAD yang lebih besar menunjukkan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan desentralisasi fiskal dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat (Santoso & Rahayu 2005). Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, selain menggunakan dana yang berasal dari pemerintah pusat. Sumber PAD ini sendiri disesuaikan dengan kapasitas

daerah berdasarkan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Besar kecilnya PAD sangat dipengaruhi oleh potensi yang dapat digali yang diasumsikan oleh pemilikan sumber daya alam dan manusia. Adanya perbedaan potensi ekonomi, sumber daya alam dan manusia akan menimbulkan kesenjangan terhadap PAD yang diperoleh oleh setiap daerah. Fenomena kesenjangan dan relatif rendahnya penerimaan antar daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah menyebabkan pemerintah daerah sering menghadapi kendala. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Kalimantan Timur yang memiliki PAD tertinggi di antara semua provinsi di Kalimantan memberdayakan potensinya sebagai penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) secara optimal. Usaha penyediaan BBM telah membawa Kalimantan Timur mencapai Rp10.549.624.013 pada realisasi PAD tahun 2019. Oleh karena itu, jika Kalimantan Barat bisa memberdayakan sektor unggulannya, maka Kalimantan Barat juga bisa mendorong peningkatan PAD dan mengelolanya untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal-hal yang mempengaruhi peningkatan PAD menurut Kemenkeu (2021) adalah ekstensifikasi pendapatan, intensifikasi pendapatan dan penguatan kelembagaan. Ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjarangan Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi baru. Intensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang. Penguatan kelembagaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi administrasi perpajakan daerah serta penyederhanaan proses bisnis.

Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 147.307 km² dan populasi sekitar 5,069 juta berdasarkan data dari BPS terbagi kedalam 14 Kabupaten/Kota, yang masing-masing wilayah bagian tersebut memiliki karakteristik potensi sumber daya alam yang beragam dan bisa berpeluang menjadi sektor yang dapat mendorong meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1. 1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2016-2020 (dalam milyar rupiah)

Kab/Kota	2020	2019	2018	2017	2016	Rata-rata
Kota Singkawang	154,27	166,20	130,86	132,10	103,26	137,34
Kota Pontianak	403,18	478,79	440,36	476,05	389,37	437,55
Kubu Raya	151,01	172,84	184,53	152,02	101,31	152,34
Kayong Utara	39,53	28,60	27,21	36,49	10,81	28,53
Melawi	30,87	40,58	40,84	67,02	34,13	42,69
Sekadau	46,98	45,36	59,09	72,78	36,60	52,16
Kapuas Hulu	79,17	79,98	76,00	131,22	67,14	86,70
Sintang	134,83	172,28	240,58	113,17	108,41	153,85
Ketapang	227,75	195,24	190,36	168,04	134,96	183,27
Sanggau	117,92	117,49	117,50	151,92	93,33	119,63
Mempawah	98,62	87,58	75,77	71,80	65,09	79,77
Landak	104,64	92,87	78,98	124,37	57,18	91,61
Bengkayang	54,41	51,96	50,53	45,59	42,68	49,03
Sambas	129,68	148,85	127,66	200,32	65,09	134,32
Total	1772,86	1878,62	1840,27	1942,89	1309,36	1748,80

Sumber : Kemenkeu, diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Grafik 1.1, dapat dilihat bahwa Kota Pontianak memiliki PAD yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Daerah lainnya bahkan tidak ada yang mencapai 50% dari PAD Kota Pontianak. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Kayong Utara yang merupakan daerah dengan PAD terendah.

Jika pemerintah daerah dapat mengelola sektor pertanian menjadi sektor yang dapat mengekspor hasil produknya hingga ke daerah lain maka Pendapatan asli Daerah dapat meningkat seiring dengan meningkatnya hasil produk dari sektor pertanian tersebut sehingga kemampuan keuangan dalam pembiayaan daerah dapat terpenuhi secara maksimal. Tak hanya sektor pertanian, peningkatan realisasi anggaran juga

dapat meningkatkan perekonomian daerah. Serta pendapatan perkapita juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, apabila pendapatan perkapita tinggi maka pajak yang akan diterima juga akan tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui seberapa besar peranan sektor pertanian daerah, pendapatan perkapita dan realisasi anggaran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diperlukan suatu metode yang berguna untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi. Dari uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Sektor Pertanian, Pendapatan Perkapita dan Realisasi Anggaran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat”**.

1.2. Pernyataan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, sektor pertanian, pendapatan perkapita, dan realisasi anggaran diyakini memiliki pengaruh terhadap peningkatan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2016-2020. Untuk membuktikan bahwa sektor pertanian, realisasi anggaran dan pendapatan per kapita tersebut berpengaruh terhadap PAD, maka diadakanlah penelitian ini.

1.3. Rumusan Masalah

4. Apakah pengaruh sektor pertanian positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Barat?
5. Apakah pengaruh realisasi anggaran positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Barat?
6. Apakah pengaruh pendapatan perkapita positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Barat?

1.4. Tujuan Penelitian

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sektor pertanian terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh realisasi anggaran terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan perkapita terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

1.5. Kontribusi Penelitian

1. Sebagai informasi ilmiah dan wawasan ilmu pengetahuan tentang Pengaruh Sektor Pertanian Ekonomi, Realisasi Anggaran dan Pendapatan per kapita terhadap PAD Daerah.
2. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi, khususnya yang berkaitan dengan penulisan ini.
3. Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.